

KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Contribution of the Fisheries Sub-Sector to Regional Economic Development in Sangihe Islands Regency

Arif Ichsan Janis, Wenny Tilaar, dan Leonardus Ricky Rengkung
Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah
Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the contribution of the fisheries sub-sector to the Gross Regional Domestic Product of the Sangihe Islands Regencys, and whether the Fisheries Sub-sector was the dominant sub-sector to the regional economic development of the Sangihe Islands Regency.

The results showed that in average the contribution of the fisheries sub-sector to the regional economic development of the Sangihe Islands Regency was 21.86% annually. This value was much greater than the contribution of other sub-sectors to GRDP. Thus, the Fisheries Sub-Sector was the dominant Sub-Sector of the GRDP of the Sangihe Islands Regency.

Keywords: fishery sub-sector, GRDP, economic development, Sangihe Islands Regency

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi sub sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan apakah Sub Sektor Perikanan merupakan Sub Sektor yang dominan terhadap pembangunan ekonomi regional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sub sektor perikanan terhadap pembangunan ekonomi regional Kabupaten Kepulauan Sangihe rata – rata setiap tahunnya sebesar 21,86%, nilai ini jauh lebih besar dari sub sektor lainnya terhadap PDRB Sektor Perikanan, Kehutanan, dan Perikanan. Dengan demikian Sub Sektor Perikanan bukanlah Sub Sektor yang dominan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kata Kunci: Sub sektor perikanan, PDRB, pembangunan ekonomi, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah merupakan suatu proses perubahan yang teratur dan terencana menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan perikanan merupakan proses dan pembaharuan yang terencana pada tatanan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat nelayan dan

petani ikan yang lebih baik. Pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejalan dengan salah satu Nawa Cita ke-3 Presiden Joko Widodo yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan harus di mengerti sebagai

suati proses multidimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi yang ada. Paling tidak terdapat 3 (tiga) komponen dasar yang harus senantiasa muncul sebagai dasar pemikiran dan memandu secara praktis konsep-konsep yang diperlukan untuk memahami dengan lebih jelas kedalaman arti pembangunan itu yaitu (1) kebutuhan pangan yang berkelanjutan (2) harga diri, dan (3) Kemerdekaan. Ketiga hal ini merupakan tujuan umum yang harus di capai oleh setiap orang dan masyarakat (Todaro,1995).

Propinsi Sulawesi Utara memiliki tata ruang propinsi yang dikenal dengan gugus laut dan gugus pulau. Gugus laut ditekankan pada pemanfaatan ekonomi yang merupakan hak pengelola dari Pemerintah Propinsi, dan gugus pulau yang menekankan pada aspek sosial yang menjadi hak pengelola dari Pemerintah Kabupaten, apalagi didukung dengan pelaksanaan undang – undang No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan, atau dengan kata lain kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sehingga lebih banyak peluang dan kesempatan bagi tiap daerah di dalam mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada.

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah kepulauan dengan luas keseluruhan wilayah 11.863,58 km² terdiri dari Lautan 11.126,61 km² dan Daratan 736,97 km². Dengan melihat keadaan yang ada maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sangihe memiliki laus lautan yang lebih besar jika dibandingkan dengan luas daratan, yang memiliki sumberdaya perikanan yang bernilai

ekonomis penting seperti tuna, cakalang, layang, tongkol, selar, kerapu, udang windu, teripang, rumput laut, ekor ikan hiu, dan mutiara.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 capaian produksi hasil perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebanyak 34.510,18 ton, sedangkan kontribusi PDRB Kabupaten

Kepulauan Sangihe atas dasar harga berlaku dari sub sektor ini mencapai Rp. 287.735.455.000.- (sumber: Gambaran Produksi Perikanan Tangkap tahun 2018, BPS Kab. Sangihe).

Melihat produksi hasil perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kontribusi PDRBnya, diharapkan sub sektor perikanan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tabel 1. Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Tahun	Produksi (ton)	Nilai (Rp000)
2015	8,530.60	71,879,150
2016	8.613,33	71.604.185
2017	8,681.30	72,383,445
2018	8,683.95	71,868,675
2019	14,427.00	58,249,672.7
2020	10,234.55	96,231,683.9

Sumber: BPS Kab. Sangihe. Gambaran Produksi Perikanan Tangkap, 2020

Terlihat pada Tabel 1 setiap tahunnya terdapat peningkatan produksi ikan positif dengan nilai rata-rata setiap tahunnya sebesar 1,47% dengan nilai produksi yang berubah-ubah tergantung permintaan pasar.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa dari tahun

2013 sampai dengan tahun 2020 kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB rata – rata sebesar 6,49% setiap tahunnya. Tahun 2013 kontribusi sektor ini terhadap PDRB sebesar 6,31% dan pada tahun berikutnya meningkat 0,13% menjadi 6,43% dengan nilai tambah sub sektor perikanan sebesar Rp.137.310.690.000,- Meskipun peningkatan persentase rata-rata kontribusi pertahun terhadap PDRB dibawah 1%, tetapi setiap tahunnya masih terjadi kontribusi positif. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor ini masih sangat penting terhadap peningkatan PDRB.

Tabel 2. Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab. Kepl. Sangihe

Tahun	Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan (Rp)	PDRB Kab. Kepulauan Sangihe (Rp)	Kontribusi Sub Sektor Perikanan (%)
2013	137.310,69	2.176.009.69	6,31
2014	147.681,56	2.297.853.08	6,43
2015	158.052,42	2.419.696.47	6,53
2016	164.356,96	2.566.764.36	6,40
2017	172.404,93	2.706.570.89	6,37
2018	181.856,22	2.855.315.99	6,37
2019	198.276,54	3.010.234.07	6,59
2020	209.906.75	3.025.233.15	6,94

Sumber : BPS Kab. Sangihe

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Untuk menganalisis dominan atau tidaknya sektor perikanan dalam pembangunan ekonomi regional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

METODE PENELITIAN

Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu (time series) selama 8 tahun mulai tahun 2013 – 2020. Sumber data yaitu semua unit kerja terkait antara lain : Biro Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Utara, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Sangihe serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitan ini variabel yang dianalisis meliputi :

1. Produksi sub sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe (ton).
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Produk Domestik regional bruto (PDRB) Propinsi Sulawesi Utara.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Alat Analisis

1. Perhitungan “share”.

Dalam perhitungan ini, dibandingkan kontribusi sub sektor perikanan terhadap total produksi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, selain itu juga dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan dengan total PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam periode tertentu, dengan rumus sebagai berikut:

$$Share = \frac{Vi}{V} \times 100\%$$

Dimana:

- Vi = PDRB sub sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe
- V = Total PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe (Isard, 1960).

2. Analisis *Location Quotient* (LQ).

Analisis LQ ini digunakan untuk melihat apakah sub sektor perikanan merupakan sektor dominan dalam prekeonomian regional khususnya dalam pembentukan PDRB, dengan rumus (Adi L., 2017):

$$LQ = \frac{b_i/b_n}{B_i/B_n}$$

Dimana:

b_i = pendapatan sub sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b_n = total pendapatan regional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

B_i = pendapatan sub sektor perikanan Propinsi Sulawesi Utara.

B_n = Total pendapatan regional propinsi Sulawesi Utara

Kriteria penilaiannya ditetapkan sebagai berikut:

- Jika nilai LQ lebih besar dari 1, maka sub sektor perikanan merupakan kegiatan ekonomi dominan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Jika nilai LQ lebih kecil dari 1, atau sama dengan 1 maka kegiatan ekonomi sub sektor tersebut bukan merupakan kegiatan dominan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan nilai LQ terlihat bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari 17 sektor terdapat 6 sektor basis dimana nilai $LQ > 1$, yakni sektor Administrasi Pemerintahan, sektor Pertahanan dan Jaminan Sosial, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda, Real Estat, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. 11 sektor yang lainnya merupakan sektor non basis dengan nilai $LQ < 1$.

Dari tahun 2013 sampai 2020 sektor

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial merupakan sektor dengan nilai rata-rata LQ tertinggi dibandingkan dengan sektor – sektor basis lainnya, yakni sebesar 1,59. Salah satu faktor pendorong yang menjadikan sektor ini sebagai sektor basis yaitu adanya penegasan Presiden dalam hal peningkatan kinerja pengelolaan administrasi pemerintahan dan pertahanan guna menciptakan Clean and Good Government, serta peningkatan pelayanan Jaminan Sosial. Kemudian diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,46. Sebagai sektor unggulan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan perhatian khusus bagi sektor ini, yakni dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peningkatan kualitas dan produksi hasil-hasil pertanian, kehutanan dan perikanan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pemberian bantuan. Selanjutnya pada urutan ketiga adalah sektor Real Estate dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,16. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi peningkatan giat di sektor ini, hal ini terlihat dengan begitu banyak pembukaan lahan pemukiman baru, pembangunan gedung kantor, hotel-hotel serta pembangunan perumahan.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor basis urutan keempat dengan nilai LQ rata-rata 1,13. Fasilitas Tol Laut yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe membawa dampak positif terhadap perekonomian daerah, yakni disparitas harga barang antara pusat dan daerah semakin rendah. Dan hal ini meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang – barang kebutuhan sandang pangan termasuk juga barang kebutuhan yang berhubungan reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki nilai LQ rata-rata yang nilainya sama dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 1,13.

Meningkatnya giat ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi dan kemitraan dalam hal permodalan untuk berusaha. Hal inilah yang menjadikan sektor jasa keuangan dan asuransi merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menempati urutan terakhir dengan nilai LQ rata-rata 1.10. Kesadaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe akan hidup sehat semakin hari semakin meningkat.

Tabel 3.Sektor – Sektor Basis di Kepulauan Sangihe

LAPANGAN USAHA		TAHUN								KET
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.45	1.46	1.48	1.50	1.47	1.47	1.45	1.45	Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0.86	0.84	0.82	0.83	0.81	0.80	0.79	0.78	Non Basis
C	Industri Pengolahan	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.58	0.55	0.54	0.56	0.57	0.57	0.60	0.58	Non Basis
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.58	0.59	0.60	0.59	0.61	0.62	0.62	0.62	Non Basis
F	Konstruksi	0.69	0.69	0.71	0.71	0.72	0.72	0.73	0.72	Non Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.14	1.16	1.16	1.16	1.20	1.23	1.23	1.25	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0.88	0.87	0.87	0.84	0.87	0.87	0.91	0.94	Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.31	0.30	0.29	0.27	0.27	0.28	0.29	0.30	Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	Non Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.10	1.14	1.13	1.21	1.17	1.15	1.12	1.15	Basis
L	Real Estat	1.17	1.16	1.15	1.14	1.15	1.15	1.18	1.15	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	Non Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.62	1.60	1.56	1.55	1.60	1.62	1.62	1.60	Basis
P	Jasa Pendidikan	0.98	1.00	0.98	0.97	0.98	0.95	0.91	0.90	Non Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.11	1.09	1.10	1.08	1.10	1.08	1.10	1.09	Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.40	0.37	0.40	Non Basis

Sub Sektor Perikanan sebagai Sub Sektor basis di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Perhitungan nilai LQ per subsektor pada sektor pertanian menunjukkan pola nilai LQ seperti terlihat pada tabel 4. Sangat jelas terlihat, subsektor perikanan menunjukkan nilai LQ yang lebih besar dari 1, lebih tinggi dibandingkan subsektor lainnya selain sub

sektor Jasa Pertanian dan Perburuan pada sektor pertanian. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa subsektor perikanan merupakan subsektor basis selama periode 2013 – 2020, hal ini dapat diartikan sub sektor perikanan sudah mampu mencukupi kebutuhan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tabel 4. Nilai *Location Quotient* (LQ) setiap sub sektor pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kepl. Sangihe, 2013 – 2020

LAPANGAN USAHA	TAHUN								KET
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Tanaman Pangan	0.48	0.48	0.50	0.50	0.48	0.48	0.50	0.48	Non Basis
Tanaman Hortikultura Semusim	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	Non Basis
Perkebunan Semusim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Non Basis
Peternakan	0.88	0.82	0.87	0.84	0.82	0.81	0.80	0.81	Non Basis
Jasa Pertanian dan Perkebunan	1.65	1.66	1.67	1.62	1.60	1.58	1.58	1.62	Basis
Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	Non Basis
Perikanan	1.11	1.05	1.08	1.04	1.05	1.07	1.06	1.08	Basis

Sumber data: Hasil Olahan.

Perhitungan pada tabel di atas juga memperlihatkan bahwa ternyata Sub Sektor Perikanan bukanlah merupakan sub sektor yang dominan pada Sektor Pertanian karena nilai LQ sub sektor perikanan lebih kecil dibandingkan dengan nilai LQ sub sektor jasa Pertanian dan Perkebunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi sub sektor perikanan rata – rata setiap tahunnya sebesar 21,86%, nilai ini jauh lebih besar dari sub sektor lainnya terhadap PDRB Sektor Perikanan, Kehutanan, dan Perikanan.
2. Dari hasil analisa dan perhitungan yang dilakukan terlihat bahwa Sub Sektor Perikanan bukanlah Sub Sektor yang dominan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe.

SARAN

- a. Peningkatan sumber daya manusia khususnya bagi para nelayan dengan mengadakan pelatihan dan penyuluhan agar para nelayan dapat menguasai berbagai alat tangkap yang dapat meningkatkan hasil tangkapannya
- b. Menjalin kerjasama dengan Negara tetangga terdekat yakni Philipina untuk membuka jalur ekspor ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, L., 2017. Analisis LQ, ShiffShare, dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Tahun 2017. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri, Vol. 2 No. 1.
- Todaro, Michael P., 2005. Pembangunan Ekonomi. Jilid 1 Edisi 9. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah